

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III 2019

Penyusun:

Penanggung Jawab : Zaid Burhan Ibrahim

Ketua Tim : Yusri

Koordinator : Tommy Hansen Panjaitan

Desain Grafis : Arriza Adiya

Editor : Luthfiya Nazla Marpaung, Arriza Adiya

Kontributor : Oktana Yudha Sakti

Nanang Heru Setyo Purdianto

Mahyiddin

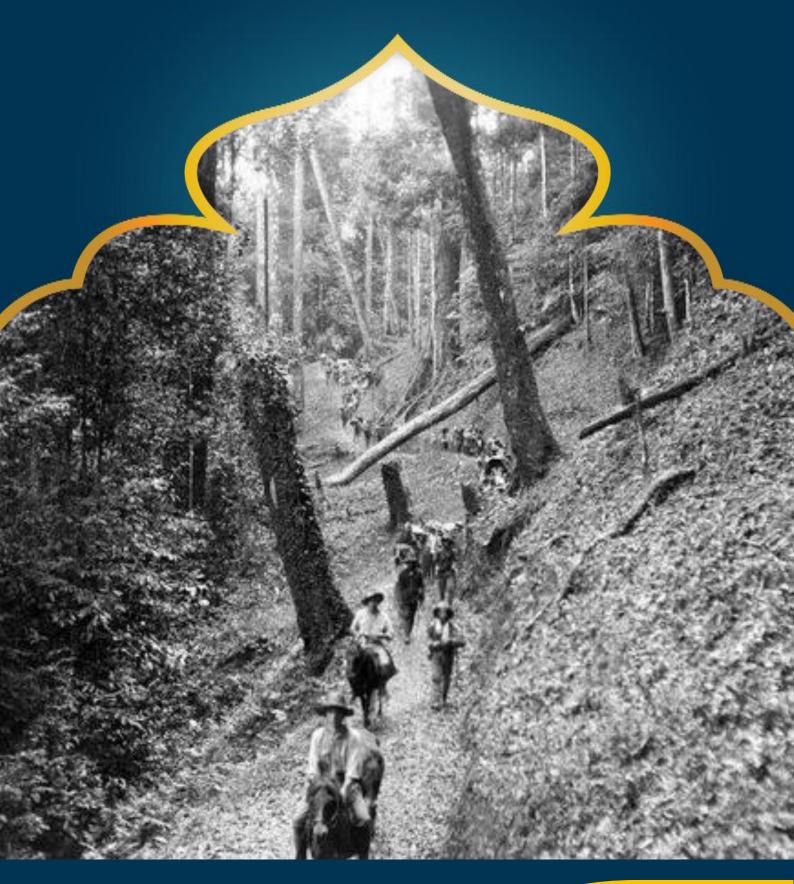




DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
I. Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional	1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
Inflasi	2
Indikator Kesejahteraan	3
II. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	5
Pendapatan Negara	5
Belanja Negara	7
Prognosis Realisasi APBN	10
III. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	13
Pendapatan Daerah	13
Belanja Daerah	17
Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2019	18
IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)	19
Pendapatan Konsolidasian	19
Belanja Konsolidasian	21
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional	22
V. Berita / Isu Fiskal Terpilih	23
Prospek Komoditi Jagung di Kab. Aceh Tenggara	23
Potensi Produksi Hulu Serei Wangi di Kab. Gayo Lues	24





ACEH HERITAGE:

4 Juni 1904, Belanda dengan Pasukan Marsose dibawah pimpinan Van Daalen mulai memasuki Tanah Alas





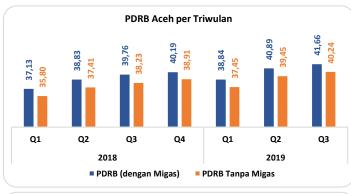
ampai dengan Triwulan III 2019, Pertumbuhan Ekonomi Aceh mencapai 3,76 persen (y-on-y), persentase penduduk miskin 15,32 persen (per Maret 2019), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,20 persen (per Agustus 2019), IPM sebesar 71,19 (2018), Ketimpangan/Gini Ratio sebesar 0,32 (per 2018), dan inflasi sebesar 2,51 persen (y-on-y per September 2019). Hampir semua indikator pembangunan telah sesuai target, kecuali pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2019 mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Untuk angka kemiskinan dan pengangguran, walaupun telah sesuai dengan target, namun angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh juga masih cukup tinggi. Program-program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan diindikasikan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan ada usaha lebih dari pemerintah untuk lebih *concern* dalam pelaksanaan program-program tersebut.

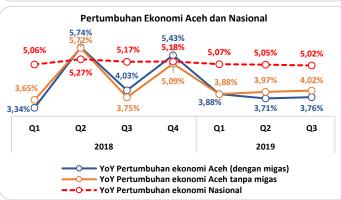
Perbandingan Target dalam KUA Provinsi Aceh dengan Capaian s.d Triwulan III 2019

Indikator Ekonomi Makro	Target KUA Aceh 2019	Aceh Q3 2019	Nasional Q3 2019
Pertumbuhan Ekonomi	5,00%	3,76%	5,02%
Kemiskinan	15,43%	15,32%	9,41%
Pengangguran	6,85%	6,20%	5,28%
IPM	70,92	71,19	71,39
Gini Ratio	0,32	0,32	0,38
Inflasi	4,00%	2,51%	3,39%

Sumber: Bappeda dan BPS Aceh, 2019 (diolah)

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)





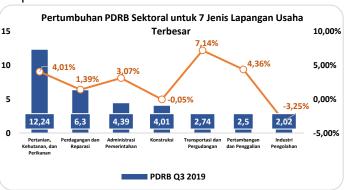
Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2018-2019 (diolah)

PDRB Aceh (ADHB) pada triwulan III 2019 sebesar 41,66 triliun, dan secara agregat 2019 (ditambah triwulan I dan II) sebesar 121,39 Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2019 mencapai 3,76 persen, artinya meningkat 5 basis poin dari triwulan sebelumnya, serta lebih rendah 126 basis poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jika komponen migas dihilangkan, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,02 persen, artinya terdapat komponen migas andil dalam pertumbuhan Aceh pada periode ini.



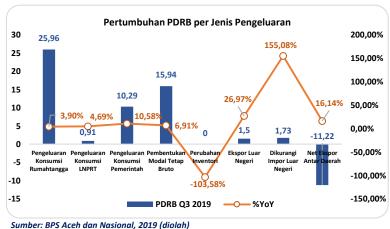
Jika dihitung secara agregat (c-to-c) PDRB Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen dengan migas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode triwulan III, terjadi percepatan yang begitu signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dari 7 Jenis Lapangan Usaha Terbesar penunjang Pertumbuhan PDRB, terdapat 2 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif diantara-nya ialah Industri Pengolahan (-3,25) dan Administrasi Pemerintahan (-0,05). Sektor Pertanian, Kehutanan



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

dan Perikanan masih menjadi sektor dengan share tertinggi dalam struktur PDRB Aceh yaitu 12,24 triliun atau 29,38 persen dari total PDRB Aceh Triwulan III 2019.

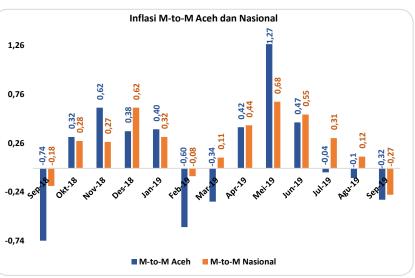


Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Tangga Rumah masih menjadi kontributor tertinggi dalam ekonomi Aceh, diikuti **PMTB** dan Belania Pemerintah. Dikurangi Impor luar Negeri mengalami kenaikan paling signifikan yaitu sebesar 155,08 persen, diikuti

Ekspor Luar Negeri dengan kenaikan sebesar 26,97 persen.

B. Inflasi

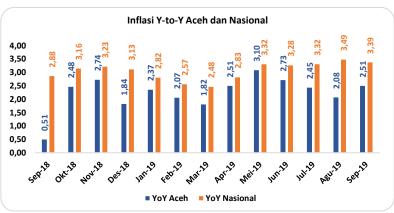
Secara m-to-m, sejak bulan Juli hingga September perlahan mengalami deflasi, setelah pada bulan Mei tercatat inflasi Aceh mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tren deflasi tersebut bertolak belakang inflasi dengan tren nasional yang meningkat.



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)



Hal ini menunjukkan bahwa setelah hari raya Idul Fitri di Aceh harga berangsur-angsur stabil. Penyumbang deflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran bahan makanan seiring dengan telah masuknya masa panen komoditas holtikultura.



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

Kontribusi Kelompok Pengeluaran pada Inflasi Aceh

Kelompok Pengeluaran	IHK Sept 2018	IHK Sept 2019	Inflasi YoY
Bahan Makanan	136,84	140,48	2,66%
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	128,97	131,92	2,29%
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	123,25	125,44	1,77%
Sandang	129,34	137,47	6,29%
Kesehatan	117,77	120,80	2,58%
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	122,62	125,30	2,18%
Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	125,82	128,18	1,87%
Sumber: BPS Aceh. 2019 (diolah)			

Jika dilihat secara y-on-y, sejak September 2018 inflasi Aceh selalu lebih rendah dari inflasi nasional. Kelompok Sandang menjadi kontributor terbesar dalam IHK mengalami peningkatan paling signifikan secara y-on-y yaitu sebesar 0,49 persen. Secara umum, beberapa komoditas yang memberikan andil dominan terhadap peningkatan indeks pada kelompok ini

adalah Emas Perhiasan sebesar 0,0358 persen, Mukena sebesar 0,0009 persen, Tas Tangan Wanita sebesar 0,0009 persen, Rok Luar Model Biasa sebesar 0,0005 persen dan Baju Kaos Berkerah sebesar 0,0004 persen.

C. Indikator Kesejahteraan

Persentase penduduk miskin di Aceh dari tahun 2016 sampai 2019 (per Maret 2019) secara umum mengalami tren penurunan, meskipun masih sedikit berfluktuasi. Sempat mengalami kenaikan pada periode Maret 2018 di level 15,97 persen dibanding periode September



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

2017 yang sebesar 15,92 persen, persentase penduduk miskin Aceh turun di periode Maret 2019 di level 15,32 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, yang bahkan selalu terjadi dalam beberapa periode terakhir.

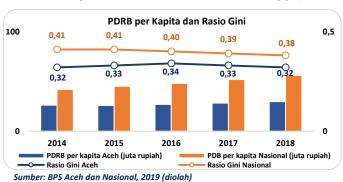


Dari sisi angka pengangguran tercatat per Agustus 2019 sebanyak 147 ribu orang, meningkat jika dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2019 yang sebanyak 136 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

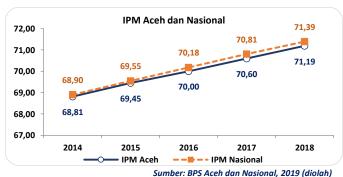
2019 sebesar 6,20 persen, naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode Februari 2019 yang mencapai 5,53 persen. Kenaikan TPT Aceh pada Agustus 2019 ini mengakhiri tren positif penurunan TPT Aceh yang terjadi sejak Agustus 2017. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angka TPT Aceh masih selalu tinggi jika dibandingkan TPT secara nasional.



Dari sisi ketimpangan, data BPS menunjukkan bahwa posisi Rasio Gini Aceh per 2018 berada pada level 0,32, artinya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,33. Angka tersebut juga terhitung lebih rendah jika dibandingkan dengan Rasio

Gini nasional yang sebesar 0,38. Namun demikian, meskipun secara pemerataan pendapatan selalu lebih rendah, secara bersamaan PDRB per Kapita Aceh juga selalu lebih rendah dibanding PDRB per kapita secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Aceh mengalami rata ke bawah, yang mana hal ini juga terlihat dari angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi.

Dari sisi pembangunan **BPS** manusia, data terakhir menunjukkan bahwa IPM Aceh sampai dengan tahun 2018 berada pada level Artinya IPM 71,19. Aceh masih termasuk dalam kategori IPM Tinggi (70≤IPM<80). Meskipun angka tersebut



masih tipis dibawah IPM Nasional (71,39), namun tren kenaikan IPM Aceh terhitung sangat stabil dari tahun ke tahun. Diharapkan tren positif ini bisa terus berlanjut, ditengah pemerintah Aceh yang terus fokus dalam peningkatan dunia pendidikan di Aceh, baik dalam hal peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi di Aceh, serta pemberian beasiswa untuk putra-putri Aceh baik dalam maupun luar negeri.





ACEH HERITAGE:

Banda Aceh, 1903, Sultan Aceh terakhir dengan Gubernur Belanda di Pendopo Gubernur





roporsi realisasi pendapatan APBN sampai dengan triwulan III 2019 yaitu pendapatan pajak sebesar 78,39 persen dan PNBP sebesar 21,61 persen. Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi pendapatan APBN sebesar Rp3,39 triliun (57,18 persen). Secara nominal meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,17 triliun (51,50 persen).

LRA APBN Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah)

United States	3 4	2018			2019			
Uraian	Pagu	Realisasi Q3	%	Pagu	Realisasi Q3	%		
A. Pendapatan	6.170,26	3.177,52	51,50%	5.928,21	3.389,46	57,18%		
Pajak	5.521,00	2.628,38	47,61%	5.261,06	2.656,91	50,50%		
PNBP	649,26	549,14	84,58%	667,15	732,55	109,80%		
B. Belanja	49.156,84	34.822,56	70,84%	51.267,47	32.037,12	62,49%		
Belanja Pusat	14.268,94	8.873,79	62,19%	14.942,54	9.666,56	64,69%		
Belanja Pegawai	5.978,79	4.569,54	76,43%	6.233,86	4.756,02	76,29%		
Belanja Barang	5.085,03	2.908,30	57,19%	5.665,62	3.428,51	60,51%		
Belanja Modal	3.179,12	1.384,29	43,54%	3.000,99	1.468,38	48,93%		
Belanja ke Bantuan Sosial	26,00	11,66	44,84%	42,06	13,65	32,45%		
Transfer ke Daerah	34.887,90	25.948,77	74,38%	36.324,94	22.370,56	61,58%		
Dana Bagi Hasil	1.328,58	876,20	65,95%	1.410,16	935,47	66,34%		
Dana Alokasi Umum	14.728,92	12.271,32	83,31%	15.242,09	12.698,79	83,31%		
Dana Alokasi Khusus	5.919,70	3.773,69	63,75%	6.228,65	3.129,28	50,24%		
Dana Otsus dan DID	8.451,29	6.354,59	75,19%	8.488,54	2.638,30	31,08%		
Dana Desa	4.459,41	2.672,96	59,94%	4.955,50	2.968,72	59,91%		
C. Surplus/Defisit APBN	-42.986,58	-31.645,04	73,62%	-45.339,26	-28.647,66	63,19%		

Sumber: Monev PA, OM SPAN, Simtrada DJPK, 2019 (diolah)

Proporsi realisasi belanja APBN yaitu 30,17 persen (9,66 triliun) merupakan belanja pusat, dan 69,83 persen (22,37 triliun) merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi belanja APBN sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp32,03 triliun (62,49 persen) yang mengalami penurunan baik secara nominal maupun secara persentase dari periode yang sama tahun sebelumnya.

A. Pendapatan Negara

1. Pendapatan Pajak

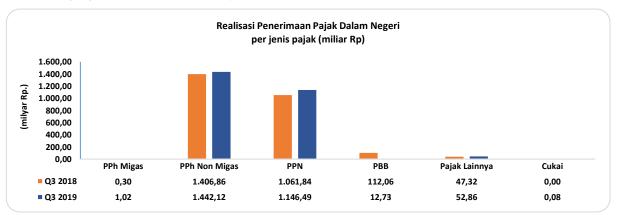
a. Pajak Dalam Negeri

Total realisasi penerimaan pajak dalam negeri di Aceh sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp2,65 triliun. Berdasarkan jenis pajak, proporsi terbesar dari total realisasi pajak dalam negeri di Aceh yaitu berasal dari PPh Non Migas yaitu sebesar 54,31 persen, diikuti PPN sebesar 43,18 persen.

Secara *y-on-y*, hampir seluruh penerimaan pajak dalam negeri mengalami peningkatan. PPh Non Migas sebagai kontributor terbesar pajak dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 2,51 persen, sedangkan PBB satu-satunya penerimaan pajak yang



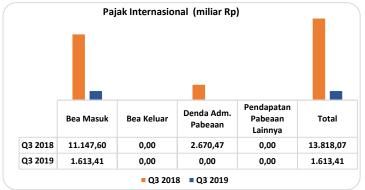
mengalami penurunan yaitu sebesar 88,64 persen. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap target penerimaan pajak di tahun 2019. Apabila dilihat secara persentase, PPh Migas mengalami peningkatan yang paling signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 283,07 persen.



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

b. Pajak Perdagangan Internasional

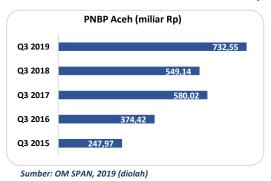
Komposisi Pajak
Perdagangan Internasional di Aceh
sampai dengan triwulan III 2019
hanya berupa Bea Masuk dengan
realisasi sebesar Rp. 1,61 miliar.
Dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya, total realisasi pajak
internasional di Aceh mengalami



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

penurunan. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan aktivitas eksporimpor yang terjadi di Aceh selama periode tahun 2019.

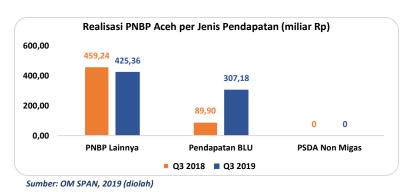
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



PNBP di Aceh menyumbang kontribusi sebesar 21,61 persen dari total pendapatan APBN di Aceh sampai dengan triwulan III 2019. Tercatat posisi terakhir realisasi PNBP Aceh sampai dengan triwulan III 2019 yaitu sebesar Rp.732,55 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 549,14 miliar.

Pendapatan PNBP Lainnya menjadi jenis PNBP dengan kontribusi terbesar, diikuti Pendapatan Badan Layanan Umum sebagai terbesar kedua. Sementara Pendapatan Sumber Daya Alam Non Migas menjadi kontributor terkecil dari total realisasi PNBP Aceh.





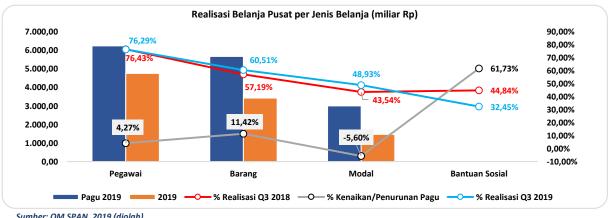
PNBP Lainnya sebagai kontributor terbesar dalam realisasi PNBP Aceh, mengalami penurunan sebesar 7,38 persen dibandingkan tahun periode yang sama sebelumnya. Selanjutnya

Pendapatan Badan Layanan Umum yang mengalami kenaikan sebesar 241,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pusat

Belanja Pegawai masih menjadi jenis belanja dengan proporsi terbesar dalam struktur Belanja Pusat di Aceh yaitu sebesar 76,29 persen. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan pagu dari tahun sebelumnya yaitu masingmasing 4,27 persen, 11,42 persen dan 61,73 persen, sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan pagu yaitu sebesar 5,60 persen. Secara keseluruhan, realisasi belanja meningkat baik secara nominal maupun secara persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Berdasarkan Fungsi Belanja, terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir Fungsi Pelayanan Umum dan Pendidikan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat di Provinsi Aceh. Tahun 2019 proporsi pagu untuk Fungsi Pelayanan Umum menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 40,94 persen dari total pagu belanja pusat dan Fungsi Pendidikan dengan proporsi pagu sebesar 18,86 persen. Tingginya porsi Belanja Fungsi Pelayanan Umum menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sedangkan pada Fungsi Pendidikan menandakan bahwa pemerintah pusat mengarahkan



kebijakan fiskal untuk membangun kualitas sumber daya manusia di Aceh. Dampaknya tercermin dari peningkatan angka IPM Aceh secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, yang mana unsur pendidikan menjadi salah satu indikatornya.

Perkembangan Belanja Pusat per Fungsi (dalam miliar rupiah)

Fungsi	Pagu 2018	Realisasi Q3 2018	% Realisasi Q3 2018	Pagu 2019	Realisasi Q3 2019	% Realisasi Q3 2019	% Kenaikan/ Penurunan Pagu	% Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Pelayanan Umum	8.457,20	4.994,41	59,06%	9.193,65	5.039,45	54,81%	8,71%	0,90%
Pertahanan	1.816,78	1.255,92	69,13%	2.285,88	1.693,58	74,09%	25,82%	34,85%
Ketertiban dan Keamanan	2.218,70	1.613,03	72,70%	2.239,62	1.730,81	77,28%	0,94%	7,30%
Ekonomi	3.396,17	1.652,20	48,65%	2.958,40	1.634,27	55,24%	-12,89%	-1,09%
Lingkungan Hidup	210,05	87,44	41,63%	347,64	147,42	42,41%	65,50%	68,60%
Perumahan dan Fasilitas Umum	732,33	438,3	59,85%	541,01	292,46	54,06%	-26,12%	-33,27%
Kesehatan	347,61	166,68	47,95%	277,77	185,35	66,73%	-20,09%	11,20%
Pariwisata dan Budaya	2,7	1,38	51,11%	1,9	0,75	39,47%	-29,63%	-45,65%
Agama	321,32	235,15	73,18%	347,82	268,38	77,16%	8,25%	14,13%
Pendidikan	3.863,72	2.253,86	58,33%	4.234,91	2.613,00	61,70%	9,61%	15,93%
Perlindungan Sosial	27,86	14,14	50,75%	29,23	13,24	45,30%	4,92%	-6,36%
Jumlah	21.394,44	12.712,51	59,42%	22.457,83	13.618,71	60,64%	4,97%	7,13%

Sumber: DitPA, 2019 (diolah)

Tahun 2019 ada beberapa Belanja Fungsi mengalami penurunan pagu dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi Pariwisata dan Budaya mengalami penurunan pagu yang paling signifikan yaitu sebesar -29,63 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan pagu paling signifikan dialami Fungsi Lingkungan Hidup (65,50 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa membangun Lingkungan Hidup menjadi salah satu arah kebijakan fiskal pemerintah pusat melalui skema APBN dalam rangka membangun perekonomian Aceh.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Jenis Transfer	Pagu 2018 (miliar Rp)	Realisasi Q3 2018	% Realisasi Q3 2018	Pagu 2019 (miliar Rp)	Realisasi Q3 2019	% Realisasi Q3 2019	% Kenaikan/ Penurunan Pagu	% Kenaikan/ Penurunan Realisasi
DBH	1.328,58	876,20	65,95%	1.410,16	935,47	66,34%	6,14%	6,76%
DAU	14.728,92	12.271,32	83,31%	15.242,09	12.698,79	83,31%	3,48%	3,48%
DAK	5.927,90	3.737,82	63,05%	6.228,65	3.129,53	50,24%	5,07%	-16,27%
DAK Fisik	2.700,80	1.520,61	56,30%	2.742,87	991,36	36,14%	1,56%	-34,81%
DAK NonFisik	3.227,09	2.217,21	68,71%	3.485,78	2.138,17	61,34%	8,02%	-3,56%
Otsus dan DID	8.451,29	6.354,59	75,19%	8.488,54	2.638,30	31,08%	0,44%	-58,48%
Otsus	8.029,79	6.022,34	75,00%	8.357,47	2.507,24	30,00%	4,08%	-58,37%
DID	421,50	332,25	78,83%	131,06	131,06	100,00%	-68,91%	-60,55%
Dana Desa	4.459,41	2.672,96	59,94%	4.955,50	2.968,72	59,91%	11,12%	11,06%
TOTAL	34.896,10	25.912,89	74,26%	36.324,93	22.370,80	61,59%	4,09%	-13,67%

Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

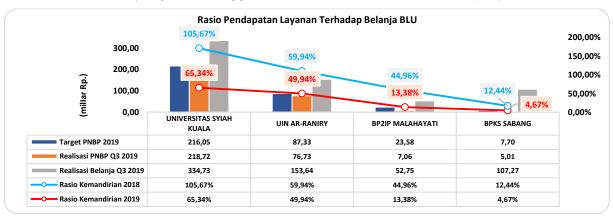
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,09 persen dari tahun sebelumnya. Jika diuraikan per jenis transfer, Dana Desa



mengalami peningkatan pagu paling signifikan yaitu sebesar 11,12 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) mengalami penurunan pagu paling signifikan yang turun sebesar -68,91 persen. Namun dari sisi realisasi, Dana Insentif Daerah (DID) juga mengalami penurunan realisasi yang paling signifikan yaitu sebesar -60,55 persen. Penurunan jumlah pagu dari tahun sebelumnya diindikasikan sebagai salah satu penyebab turunnya realisasi DID di tahun 2019.

3. Pengelolaan BLU Pusat

Kemandirian BLU dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan suatu BLU terhadap RM, yang artinya bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan layanan BLU terhadap total belanja yang direalisasikan di tahun yang bersangkutan. Grafik diatas menunjukkan bahwa diantara 4 satker BLU Pusat di Aceh, sampai dengan triwulan III 2019, pendapatan layanan Unsyiah dan UIN Ar-Raniry telah melebihi realisasi belanja. Hal ini menunjukkan kedua BLU tersebut tidak ketergantungan terhadap alokasi dana APBN, sedangkan BPKS Sabang dan BP2IP Malahayati menunjukkan ketergantungan terhadap alokasi dana APBN yang masih tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.



Sumber: OM SPAN dan Monev PA, 2019 (diolah)

4. Manajemen Investasi Pusat

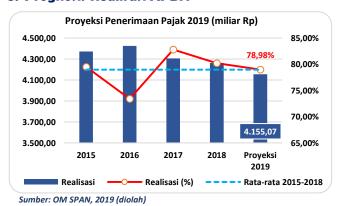
Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Aceh hingga Triwulan III 2019 mencapai Rp1.551,40 miliar, dengan jumlah debitur sebesar 57.589 debitur. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa rata-rata per debitur memiliki kredit sebesar Rp38,58 juta. Dari 12 kategori jenis usaha debitur KUR di Aceh, penyaluran untuk Sektor Perdagangan menjadi yang terbesar yaitu sebesar 51,25 persen dari total KUR yang tersalur. Terbesar kedua yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 25,78 persen dari total KUR yang tersalur. Sedangkan sektor dengan jumlah kredit terkecil berasal dari Pertambangan dan Penggalian yang hanya sebesar Rp22 juta atau sebesar 0,001 persen dari total KUR yang tersalur di Aceh.



Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi s.d Triwulan III 2019 (juta rupiah)

Nama Sektor	Kredit	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit per debitur
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	399.910,80	300.659,14	18.935,00	21,12
Perikanan	30.729,00	24.496,21	1.168,00	26,31
Pertambangan dan Penggalian	22,00	18,79	2,00	11,00
Industri Pengolahan	111.025,00	80,82	4.480,00	24,78
Konstruksi	2.129,00	1,99	17,00	125,24
Perdagangan Besar dan Eceran	795.073,65	623,19	25.599,00	31,06
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	44.458,70	35,43	1.163,00	38,23
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	21.813,00	15,57	993,00	21,97
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	15.316,53	13,16	213,00	71,91
Jasa Pendidikan	471,00	0,29	29,00	16,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.561,00	6,38	152,00	49,74
பூது நடிந்து அதித்தில் இதிக்கிற்காக பிரியாக விரியாக பிரியாக பிரியாக்க பிரியாக பிரியாக பிரியாக பிரியாக பிரியாக பிரியாக பிரியாக பிரியா	122.887,95	93,82	4.838,00	25,40
Total	1.551.397,64	326.044,79	57.589,00	38,58

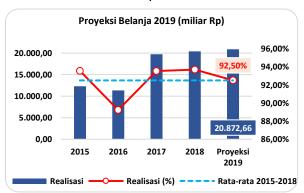
C. Prognosis Realisasi APBN



Prognosis realisasi Pendapatan Pajak, dihitung berdasarkan rata-rata realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan kebijakan-kebijakan, serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan berada pada

kisaran kurang lebih 79 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp4,15 triliun.





Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Sedangkan PNBP dan Belanja dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 4 tahun terakhir. Realsasi PNBP pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 110 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp.730,28 miliar. Realisasi Belanja pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 92,50 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp20,87 triliun.



Proyeksi TKDD 2019

			. regener				
Jenis Transfer	% Realisasi 2015	% Realisasi 2016	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	Rata-rata Realisasi 2015-2018	Pagu 2019 (miliar Rp)	Proyeksi Akhir Tahun 2019 (miliar Rp)
DBH	79,50%	80,47%	58,31%	84,34%	75,66%	1.410,02	1.066,75
DAK	98,43%	80,66%	92,47%	94,11%	91,42%	15.242,09	13.933,93
Dana Desa	100,00%	99,81%	99,88%	99,94%	99,91%	6.228,65	6.222,89
DAU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.488,54	8.488,54
Otsus & DID	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	99,95%	4.955,50	4.952,90

Sumber: Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)

Untuk Prognosis TKDD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 3 tahun terakhir, dimana DAU serta Dana Otsus dan DID diproyeksikan akan terealisasi diatas 99 persen sampai dengan akhir tahun 2019, sedangan DAK dan DBH diproyeksikan akan terealisasi masing-masing sebesar 91,42 persen dan 75,66 persen.

Proyeksi Realisasi APBN Lingkup Provinsi Aceh Tahun 2019

Uraian	% Realisasi 2015	% Realisasi 2016	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	Prognosis % Realisasi 2019	Pagu 2019 (miliar Rp.)	Proyeksi Akhir Tahun 2019 (miliar Rp.)
Pendapatan Negara							4.885,35
Pajak	79,51%	73,40%	82,80%	80,20%	79,98%	5.261,06	4.155,07
PNBP	81,39%	80,56%	140,24%	136,12%	109,58%	666,45	730,28
Belanja Negara	93,55%	89,24%	93,54%	93,69%	92,50%	22.564,13	20.872,66
Surplus/Defisit							-15.987,31

Sumber: Monev PA, Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)

Pendapatan APBN diproyeksikan mengalami penurunan, baik pada Penerimaan Pajak maupun PNBP. Dari sisi pengeluaran, belanja negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,18 persen. Penurunan lebih dikarenakan penurunan pada realisasi Jenis Belanja Pegawai, Belaja Barang dan Belanja Modal secara nominal, yang mana merupakan dampak dari menurunnya pagu pada jenis belanja tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.



MASA DEPAN KEK ARUN LHOKSEUMAWE

Setelah sekian waktu tertunda, akhirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe diresmikan Presiden Joko Widodo di penghujung tahun lalu. Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan groundbreaking Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh serta peresmian Flyover Simpang Surabaya, Underpass Beurawe dan Mesjid At-Taqarrub Pidie Jaya (kontan.co.id, 14/12/2018).

KEK Arun Lhokseumawe sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2017. Pengusulnya adalah Konsorsium yang terdiri dari PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (sekarang bernama PT Pembangunan Aceh). Kegiatan bisnis utama kawasan strategis ini meliputi industri energi, industri petrokimia, pelabuhan dan logistik, serta agroindustri.

Kehadiran KEK Arun Lhokseumawe diharapkan dapat kembali memacu perekonomian Aceh, khususnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Kawasan strategis ini juga digadang-gadang kelak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Sebagaimana diketahui, berakhirnya masa kejayaan migas Arun yang berlangsung lebih dari empat dasawarwa, telah memukul perekonomian Bumi Serambi Mekah dan kedua wilayah tersebut.

Harapan besar pada KEK Arun Lhokseumawe taklah berlebihan. Sebelum pembentukannya, dalam kawasan telah beroperasi BUMN-BUMN kakap yang kini menjadi anggota konsorsium. Kawasan ini juga berada pada lokasi geografis sangat strategis, dekat perairan Selat Malaka, dengan sumber daya perikanan dan perkebunan yang melimpah.

Yang tak kalah penting, kawasan ini telah memiliki infrastruktur cukup lengkap, seperti pelabuhan, bandar udara, jalan utama, listrik, gas, dan air bersih. Ditambah lagi dengan ketersediaan aset-aset peninggalan eks PT Arun NGL, seperti fasilitas-fasilitas produksi, storage yard, jaringan pipa transmisi, perbengkelan, perkantoran, serta perumahan dan sarana pendukungnya.

Tersendat-sendat

Meski memiliki berbagai keunggulan, perkembangan KEK Arun Lhokseumawe masih tersendat-sendat. Tampaknya belum ada kepastian investor di luar perusahaan eksisting yang berinvestasi dalam kawasan ini. Akhir tahun lalu, sempat beredar kabar PT Korina Refinery (Korea), Aksa Enerji Uterim (Turki), dan Malaysia Mining Corporation telah menyatakan keseriusannya berinvestasi.

LMAN juga pernah menyebutkan sudah ada enam perusahaan dalam dan luar negeri, tanpa menyebut namanya, berminat menjadi investor (kontan.co.id, 14/12/2018, 1/2/2019). Sayangnya, rencana investasi perusahaan-perusahaan tersebut hingga kini tak jelas kelanjutannya. Di tengah kelesuan ini, berhembus berita menggembirakan. PT PIM, salah satu perusahaan eksisting, akan segera membangun pabrik pupuk NPK (nitrogen, posfor dan kalium) dengan investasi mencapai Rp 1 triliun (Serambi, 3/3/2019). Pembangunan pabrik tersebut tentu akan menyerap tenaga kerja, baik untuk keperluan konstruksi maupun untuk kegiatan operasionalnya nanti.

Yang juga melegakan, beberapa upaya mendukung keberadaan kawasan telah dilakukan, di antaranya penyiapan infrastruktur kawasan, pembentukan berbagai lembaga (Dewan Kawasan KEK, Administrator, dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP)/PT Patriot Nusantara Aceh), dan peningkatan pelayanan administrasi.

Sejumlah isu

Kita tentu berharap KEK Arun Lhokseumawe secepatnya tancap gas dan melaju kencang. Untuk mewujudkannya, ada sejumlah isu terkait investasi dan pengembangan kawasan yang perlu mendapat perhatian serius dan mesti segera ditangani. Pertama, sewa lahan dan fasilitas dalam kawasan. Sewa lahan dan fasilitas LNG Arun yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih mahal.

Jangka waktu sewa lahan pun ditentukan paling lama 15 tahun. Untuk kepentingan bisnis investor, jangka waktu tersebut mestinya dapat mencapai 30 tahun. Meskipun waktu sewa dapat diperpanjang lagi, perubahan ketentuan ini sangat penting karena terkait dengan kepastian dan kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi dalam kawasan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, disebutkan waktu sewa lahan dapat lebih dari lima tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama penyediaan infrastruktur, atau kegiatan dengan karakteristik usaha memerlukan waktu sewa lebih dari lima tahun. Ini bermakna bahwa sewa lahan dapat saja diberlakukan selama 30 tahun atau bahkan lebih.

Kedua, koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Karakteristik KEK Arun Lhokseumawe yang dibentuk oleh sejumlah BUMN eksisting dan keberadaan LMAN sebagai pengelola aset eks PT Arun NGL menimbulkan berbagai implikasi. Salah satunya menyangkut penyertaan modal anggota konsorsium. Sampai kini, PT Pertamina dan PT Pelindo I masih belum memenuhi komitmen penyertaan modalnya.

Ini tentu mempengaruhi pengelolaan dan kegiatan operasional KEK. Karena itu, perlu segera dibangun pola dan mekanisme kerja yang lebih efektif dan konstruktif, yang saling menguntungkan berbagai pihak dalam kawasan.

Ketiga, perizinan dan implementasi insentif fiskal. Pengurusan berbagai izin di KEK Arun Lhokseumawe memakan waktu lama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aceh, yang mengeluarkan berbagai izin untuk pelaku usaha, berada di Banda Aceh. Sedangkan untuk sewa lahan yang dikelola LMAN, investor mengurus ke Jakarta. PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) selaku BUPP mestinya dapat diberi otoritas lebih besar dalam pengurusan berbagai perizinan.

Mengenai insentif fiskal, implementasi keringanan pajak dan bea masuk bagi para investor baru maupun perusahaan-perusahaan eksisting juga masih dipertanyakan. Kesepakatan dan keseriusan berbagai lembaga pemerintah terkait untuk mengatasinya sangatlah dibutuhkan.

Keempat, kesiapan tenaga kerja daerah. Masyarakat, khususnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara di mana KEK berada, sangat berharap tenaga kerja lokal terserap maksimal dalam KEK. Dibutuhkan kerja sama tripartit yang erat dan sinergis antara pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan KEK, dan perguruan tinggi, dalam penyiapan tenaga kerja ini.

Juga diperlukan penguatan kapasitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada untuk menghasilkan para lulusan yang terampil, siap pakai, dan kompetitif di pasar tenaga kerja KEK.

Dapat dicabut

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikabarkan akan mengaudit efektivitas 12 KEK yang ada di seluruh Indonesia, termasuk KEK Arun Lhokseumawe (Serambi, 23/2/2019). Audit ini dilaksanakan untuk menentukan kebijakan pengembangan KEK ke depan yang terkait dengan regulasi, lembaga pengelolaan dan investasi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejak penetapannya tanggal 17 Februari 2017 sampai kini, KEK Arun Lhokseumawe telah berusia lebih dari dua tahun. Dalam PP No. 5 tahun 2017 dinyatakan jika kawasan ini belum siap beroperasi setelah tiga tahun sejak diundangkan, maka Dewan Nasional KEK dapat saja mengusulkan untuk membatalkan dan mencabut keberadaannya. Dewan Nasional KEK juga dapat melakukan salah satu dari tindakan berikut: mengubah luas wilayah, memberikan perpanjangan waktu paling lama dua tahun, atau melakukan penggantian badan usaha

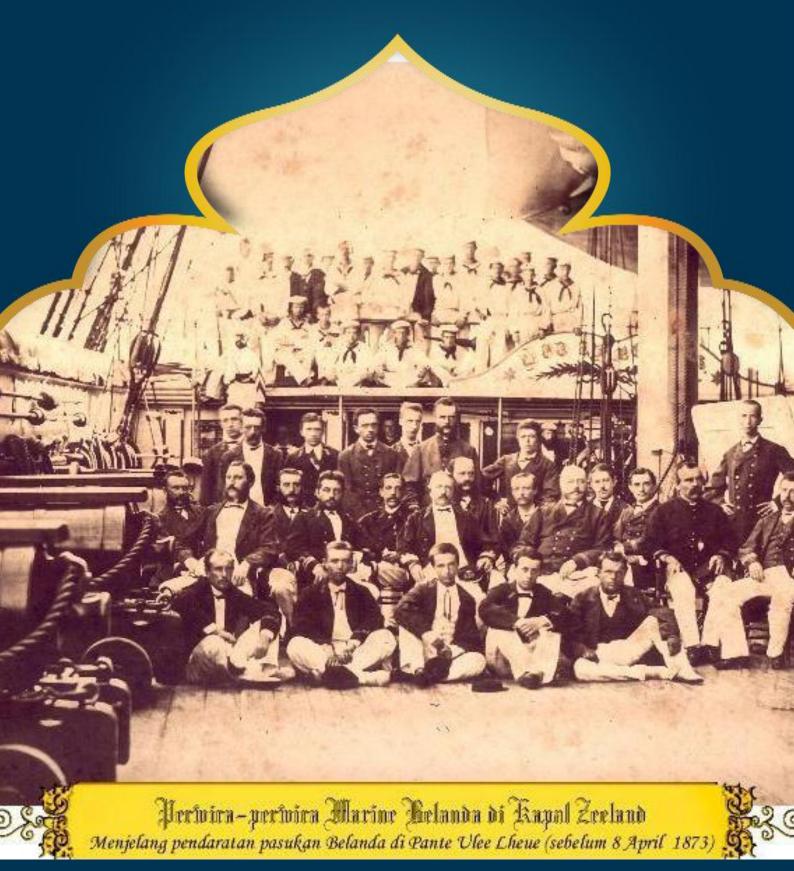
PLT Gubernur Aceh, yang mengomandani Dewan Kawasan KEK, sepertinya perlu melakukan komunikasi dan negosiasi intensif dengan para anggota konsorsium, PT Patna, LMAN, Dewan Nasional KEK, Pemerintah Pusat, dan Presiden, guna mencari solusi terbaik. Kesamaan visi dan sinergitas langkah para pemangku kepentingan akan sangat menentukan nasib KEK Arun Lhokseumawe dan perekonomian Aceh ke depan.

Dr.Ichsan M. Ali Basyah Amin

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unversitas Malikussaleh

Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2019/05/20/masa-depan-kek-arun-lhokseumawe?page=all.





ACEH HERITAGE:

Pantai Ulee Lheue, Sebelum 8 April 1873, Perwira-perwira Marine Belanda berfoto di Kapal Zeeland menjelang pendaratan di pantai Ulee Lheue





roporsi terbesar dari realisasi Pendapatan APBD di Aceh yaitu berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 85,91 persen dari total realisasi Pendapatan. PAD hanya memiliki porsi sebesar 13,51 persen dari total pendapatan, dan sisanya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,57 persen. Artinya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Secara total, terjadi kenaikan realisasi Pendapatan APBD jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pagu dan Realisasi APBD (APBA + APBK) Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah)

ragu dan Keansasi Ai BB (Ai		2018			2019	
URAIAN	Pagu	Realisasi Q3	%	Pagu	Realisasi Q3	%
PENDAPATAN	42.681,11	30.266,39	70,91%	42.377,53	23.993,72	56,62%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.998,05	3.618,48	60,33%	5.498,55	3.242,11	58,96%
Transfer Pemerintah Pusat	34.887,89	25.948,77	74,38%	36.324,79	20.613,84	56,75%
DBH	1.328,58	876,20	65,95%	1.410,02	554,45	39,32%
DAU	14.728,92	12.271,32	83,31%	15.242,09	11.833,79	77,64%
DAK	5.919,71	3.773,69	63,75%	6.228,65	2.813,87	45,18%
Dana Otsus dan DID	8.451,29	6.354,59	75,19%	8.488,54	2.712,79	31,96%
Dana Desa	4.459,40	2.672,96	59,94%	4.955,50	1.713,07	34,57%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.795,17	699,14	38,95%	554,19	137,78	24,86%
BELANJA	43.056,45	21.726,71	50,46%	47.782,83	21.208,75	44,39%
Belanja Daerah	36.499,74	17.506,62	47,96%	38.017,87	17.687,79	46,52%
Belanja Pegawai	13.946,81	8.930,30	64,03%	14.953,78	8.671,49	57,99%
Belanja Barang dan Jasa	12.608,31	4.686,20	37,17%	12.555,87	5.307,94	42,27%
Belanja Modal	7.675,58	2.384,55	31,07%	9.162,64	2.567,39	28,02%
Belanja Bantuan Sosial	756,60	561,73	74,24%	219,42	133,86	61,01%
Belanja Tak Terduga	114,32	41,39	36,21%	210,37	35,91	17,07%
Belanja Lainnya	1.398,12	902,44	64,55%	915,80	971,20	106,05%
Transfer	6.556,71	4.220,09	64,36%	9.764,96	3.520,97	36,06%
Belanja Bagi Hasil	1.053,17	731,75	69,48%	737,40	205,47	27,86%
Belanja Bantuan Keuangan	5.503,54	3.488,34	63,38%	9.027,56	3.315,49	36,73%
SURPLUS/DEFISIT	-375,34	8.539,67	-2275,19%	-5.405,30	2.784,97	-51,52%
PEMBIAYAAN	1.998,48	2.099,28	105,04%	2.300,22	3.856,35	167,65%
Penerimaan Pembiayaan	2.100,43	2.114,80	100,68%	2.408,09	3.874,92	160,91%
Pengeluaran Pembiayaan	101,95	15,52	15,23%	107,87	18,57	17,22%
SILPA	1.623,14	10.638,95	655,45%	-3.105,08	6.641,32	-213,89%

Sumber: Simtrada DJPK, BPKA dan Seluruh Badan Pengelolaan Keuangan Lingkup Aceh, 2019 (diolah)

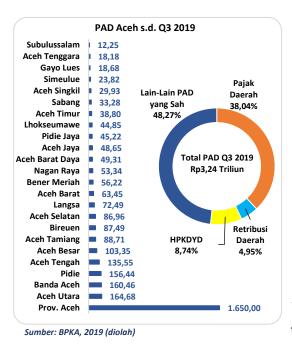
Secara total, realisasi Belanja APBD mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun dari sisi persentase jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pengesahan APBA yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018 ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas belanja pemerintah daerah, hal ini terlihat dari lambatnya penyerapan pada belanja pemerintah daerah.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat tergambar dari kecilnya proporsi PAD dalam struktur APBD di Aceh. Data sampai dengan triwulan III 2019 menunjukkan bahwa total realisasi PAD dari seluruh pemda di Aceh yaitu sebesar Rp3,24 triliun atau hanya 13,51 persen dari total pendapatan daerah.





Dari total realisasi PAD, porsi terbesar berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah (48,27 persen), diikuti Pajak Daerah (38,04 persen), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (8,74 persen), dan proporsi paling kecil berasal dari Retribusi Daerah (4,95 persen).

Jika dilihat dari realisasi per pemda, realisasi PAD hingga triwulan III 2019 didominasi oleh penerimaan dari Pemda Provinsi Aceh dengan total realisasi sebesar Rp1.650,00 miliar, atau secara persentase sebesar 50,89 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Jauh lebih tinggi dari daerah dengan realisasi PAD terbesar

kedua yaitu Kab. Aceh Utara yang sebesar Rp164,68 miliar atau secara persentase sebesar 5,08 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan sumber penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam katergori pajak provinsi lebih besar jika dibandingkan dengan pajak kabupaten/kota.

Terlihat dari lima pemda dengan realisasi pajak daerah terbesar di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki realisasi pajak daerah yang tertinggi dengan total realisasi hingga triwulan III 2019 sebesar Rp912,58 miliar. Realisasi



Pajak Daerah untuk Provinsi Aceh mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp462,01 miliar.

Salah satu komponen PAD yang lain yaitu Retribusi Daerah. Meskipun dalam komposisi PAD Aceh retribusi daerah tidak terlalu besar, namun realisasi yang dicapai pemda



dalam beberapa tahun terakhir (untuk periode yang sama) menggambarkan progres yang positif dari pemda dalam rangka menggali potensi penerimaannya. Dari 5 daerah dengan capaian realisasi pendapatan retribusi terbesar di lingkup Provinsi Aceh,



Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah dengan kontribusi realisasi terbesar, dimana realisasi Retribusi Daerah pada Kab. Pidie mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (naik 211,72 persen). Peningkatan pendapatan Retribusi Daerah paling signifikan dialami Kab. Aceh Singkil, yaitu meningkat 684,94 persen dari periode yang sama tahun sebelumya.

Sedangkan untuk realisasi PAD lainnya terdiri dari Lain-lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Untuk Lain-lain PAD yang Sah pada triwulan III 2019 telah terealisasi sebesar Rp1.565,01 miliar dan merupakan jenis PAD dengan proporsi terbesar yaitu



Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

48,27 persen, terdiri dari Pendapatan Layanan BLUD, Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), Pendapatan Zakat, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Pengembalian, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Sedangkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi sebesar Rp283,42 miliar atau secara proporsi hanya sebesar 8,74 persen dari total PAD. Dari jumlah keduanya, Pemda Provinsi Aceh memiliki realisasi tertinggi jika diuraikan per pemda di lingkup Provinsi Aceh dengan realisasi sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp730,20 miliar, diikuti Kota Subussalam dengan realisasi sebesar 137,80 miliar.

2. Pendapatan Transfer

76.39%

59.35%

77,46%

O3 2015

Pendapatan Transfer dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 85,91 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer sampai dengan triwulan III 2019 tercatat sebesar 56,75 persen dari pagu tahun 2019.

Dana Otsus dan DID

35 81%

83.15%

03 2017

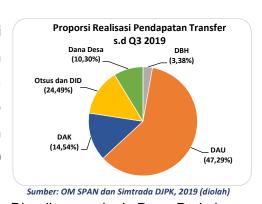
58,70% -

63.75%

83,31%

65,95%

O3 2018



Persentase Penyaluran Dana Perimbangan serta 50.24% 66,34% 03 2019 Otsus dan Penyesuaian/DID

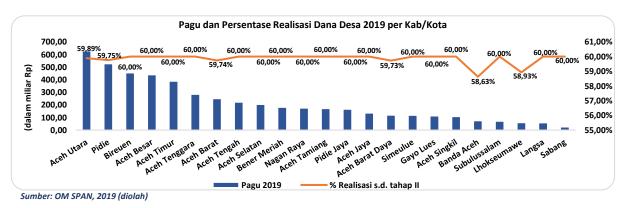
Diuraikan per jenis Dana Perimbangan serta Dana Otsus dan Dana Insentif Daerah, penurunan terjadi pada persentase penyaluran Dana Otsus dan Dana Insentif Daerah serta DAK. Penyaluran Dana Otsus dan Dana Insentif Daerah sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 31,08 persen, turun jika

55.28% "

O3 2016



dibandingkan persentase penyaluran periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,19 persen. Penyaluran DAK sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 50,24 persen, turun jika dibandingkan persentase penyaluran periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,75 persen. Hal ini disebabkan adanya beberapa pemda yang gagal kontrak, dan batas waktu panyaluran tahap pertama yang masih sampai bulan Juli menyebabkan realisasi DAK Fisik masih sangat rendah jika di hitung berdasarkan *cut off* data penyaluran per September 2019.



Untuk Dana Desa, total persentase realisasi sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 59,91 persen dari total pagu penyaluran tahun 2019. Persentase tersebut merupakan agregat dari penyaluran tahap I dan tahap II tahun 2019. Secara ketentuan, Dana Desa sampai dengan tahap II seharusnya tersalurkan 60 persen dari total pagu. Hanya saja untuk Provinsi Aceh masih terdapat beberapa desa yang penyalurannya kurang dari 60 persen. Selain karena pembulatan, kurangnya realisasi penyaluran tersebut dikarenakan juga adanya unsur pengurang yang berasal dari gagal salur kepada beberapa desa yang tidak memiliki persyaratan salur Dana Desa, khususnya untuk laporan pertanggungjawaban pada periode sebelumnya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan triwulan III 2019 telah terealisasi sebesar Rp137,78 miliar, berkontribusi sebesar 0,57 persen terhadap total realisasi Pendapatan APBD Aceh triwulan III 2019. Namun realisasi tersebut menurun jika dibandingkan realisasi pada triwulan III 2018 yang sebesar Rp154,39 milar.



Jika dirinci per jenis pendapatannya, kontribusi terbesar pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk realisasi triwulan III 2019 berasal dari Pendapatan Lainnya yang sebesar Rp82,90 miliar. Diikuti pendapatan Dana Hibah dengan realisasi sebesar Rp54,88

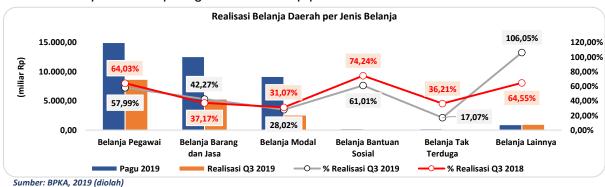


miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, hanya Dana Hibah yang mengalami peningkatan realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya sedangkan Pendapatan Lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan.

B. Belanja Daerah

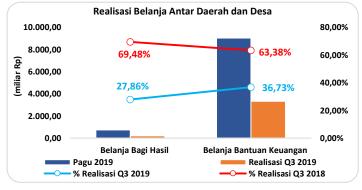
1. Belanja dan Transfer APBD Berdasarkan Jenis Belanja

Diantara empat jenis belanja dalam struktur Belanja Daerah di Aceh, sampai dengan triwulan III 2019 persentase realisasi tertinggi berada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 57,99 persen, menurun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (64,03 persen). Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa terealisasi sangat rendah sampai dengan triwulan III 2019, dengan masing-masing sebesar 28,02 persen untuk Belanja Modal, dan 42,27 persen pada Belanja Barang dan Jasa. Persentase realisasi pada Belanja Modal juga menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan persentase Belanja Barang mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pengesahan APBA yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018 ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas belanja pemerintah daerah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah mengingat komponen yang paling rendah dalam hal realisasinya adalah Belanja Modal, jenis belanja yang diharapkan memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian.



Belanja Transfer Antar Daerah dan Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil, dengan masing-masing realisasi sampai dengan triwulan III 2019 sebesar

Rp3.315,49 miliar dan Rp205,47 miliar. Secara persentase realisasi, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

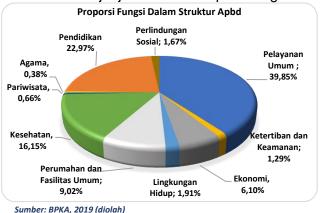


Sumber: BPKA, 2019 (diolah)



2. Belanja APBD per Fungsi

Dalam struktur Belanja APBA (Pemerintah Provinsi Aceh), proporsi terbesar dalam realisasi belanja jika diuraikan per Fungsi berasal dari Fungsi Pelayanan Umum (39,85



persen), diikuti posisi kedua yaitu Fungsi Pendidikan (22,97 persen), dan ketiga yaitu Fungsi Kesehatan (16,15 persen). Angka proporsi tersebut terhitung kurang produktif jika dilihat dari sudut pandang peningkatan perekonomian Aceh, dikarenakan kecilnya proporsi untuk Fungsi Ekonomi yang hanya sebesar 6,10 persen.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2019

Untuk proyeksi realisasi PAD dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan ratarata penerimaan pajak dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan belanja pusat APBN dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja pada periode 2015-2018 yang kemudian menjadi pengali pagu belanja APBN tahun 2019.



Dengan memperhitungkan pertumbuhan rata-rata realisasi PAD dalam 4 tahun terakhir, realisasi PAD pada akhir tahun 2019 diprediksi akan mengalami peningkatan secara nominal jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PAD

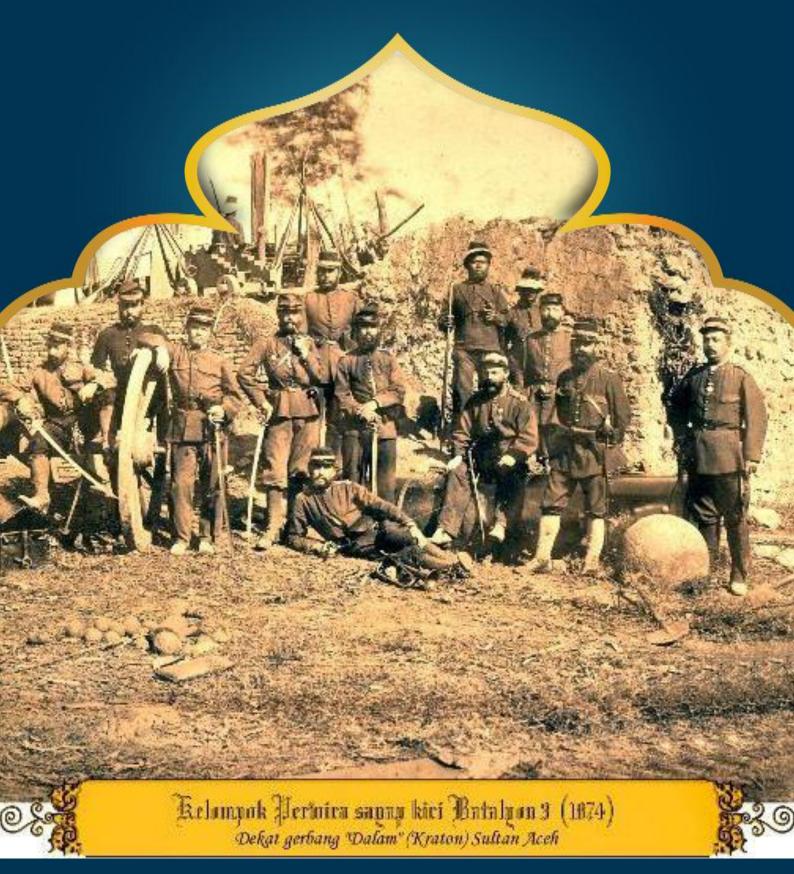
pada tahun 2019 diprediksi akan mencapai ± Rp4,91 triliun, atau dengan kenaikan yang diprediksi sebesar ±7,30 persen dari realisasi PAD tahun 2018.

Proyeksi realisasi belanja APBD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja dalam 4 tahun terakhir. Dalam perhitungannya, rata-rata persentase realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir yaitu 90,47 persen. Rata-rata persentase



realisasi tersebut selanjutnya menjadi pengali dari pagu belanja daerah tahun 2019, sehingga belanja pusat pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih sebesar 90,47 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp43,23 triliun.





ACEH HERITAGE:

1874, Kelompok Perwira sayap kiri Batalyon 3 dekat gerbang "Dalam" (Kraton) Sultan Aceh.





ari realisasi Anggaran Konsolidasi (sampai dengan triwulan III 2019) terdapat penurunan secara Y-on-Y sebesar 19,41 persen pada realisasi pendapatan pada tahun ini, dan terjadi kenaikan sebesar 0,90 persen pada realisasi belanja. Penurunan realisasi pendapatan negara memberikan sinyal bahwa pemerintah perlu memperluas potensi penerimaan negara di Aceh demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Disisi lain, penurunan realisasi belanja juga perlu mendapatkan perhatian khusus, dimana Aceh memerlukan stimulus dari belanja pemerintah untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada beberapa tahun terakhir masih belum stabil.

Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah)

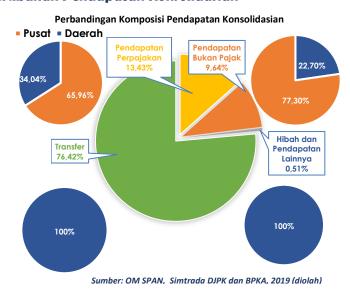
33		Q3 2019		Realisasi	% Kenaikan/
Uraian	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Konsolidasi Q3 2018	Penurunan
Pendapatan Negara	2.979,71	23.993,72	26.973,43	33.472,00	-19,41%
Pendapatan Pajak	2.389,65	1.233,19	3.622,84	3.820,76	-5,18%
Pendapatan Bukan Pajak	590,06	2.008,92	2.598,98	2.975,23	-12,65%
Hibah	0,00	54,88	54,88	28,09	95,34%
Transfer	0,00	20.613,84	20.613,84	25.948,77	-20,56%
Pendapatan Lainnya	0,00	82,90	82,90	699,14	-88,14%
Belanja Negara	9.666,56	21.208,75	30.875,31	30.600,51	0,90%
Belanja Pegawai	4.756,02	8.671,49	13.427,51	13.499,85	-0,54%
Belanja Barang dan Jasa	3.428,51	5.307,94	8.736,45	7.594,50	15,04%
Belanja Modal	1.468,38	2.567,39	4.035,77	3.768,84	7,08%
Belanja Bantuan Sosial	13,65	133,86	147,51	573,39	-74,27%
Belanja Tak Terduga	0,00	35,91	35,91	41,39	-13,23%
Belanja Transfer	0,00	3.520,97	3.520,97	4.220,09	-16,57%
Belanja Lainnya	0,00	971,20	971,20	902,44	7,62%
Surplus/Defisit	-6.686,85	2.784,97	-3.901,88	2.871,49	-235,88%
Pembiayaan	0,00	3.856,35	3.856,35	2.099,28	83,70%
Penerimaan Pembiayaan	0,00	3.874,92	3.874,92	2.114,80	83,23%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	18,57	18,57	15,52	19,65%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	-6.686,85	6.641,32	-45,53	4.970,77	-100,92%

Sumber: OM SPAN, Simtrada DJPK dan BPKA, 2019 (diolah)

A. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Perbandingan Proporsi dan Perubahan Pendapatan Konsolidasian

Di antara empat jenis pendapatan negara konsolidasian, realisasi pendapatan transfer memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain, yaitu sebesar 76,42 persen dari seluruh realisasi pendapatan. Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan proporsi terbesar kedua yaitu Pendapatan Pajak yang hanya sebesar 13,43 persen. Hal ini menandakan bahwa sumber pendapatan





yang ada di Aceh saat ini masih belum mampu untuk menutup kebutuhan pendanaan di Aceh, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.



Secara persentase perubahannya, penurunan pada Pendapatan Lainnya dan Hibah mengalami merupakan yang paling signifikan (-81,05 persen). Jika diurakan, penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan yang

sangat signifikan pada komponen pendapatan APBD di pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Aceh menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak yang menurun, disaat PDRB Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan serta pengawasan yang lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan diharapkan mampu dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan realisasi pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

penerimaan pajak dan bukan pajak) terhadap PDRB Aceh triwulan III 2019 juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah yang belum maksimal dalam menggali sumber penerimaan melalui pendapatan bukan pajak.

Sejalan dengan penurunan Rasio Pajak, maka Rasio Pendapatan (gabungan naan pajak dan bukan Perkembangan Rasio Pajak dan Rasio Pendapatan Aceh terhadap PDRB Aceh (dalam miliar rupiah)

<u> </u>			
Q3 2016	Q3 2017	Q3 2018	Q3 2019
3.671,20	3.532,56	3.820,76	3.622,84
2.619,16	3.532,56	2.975,23	2.598,98
6.290,36	7.065,12	6.795,99	4.194,65
66.790,00	71.290,00	76.460,00	79.730,00
5,50%	4,96%	5,00%	4,54%
9,42%	9,91%	8,89%	5,26%
	3.671,20 2.619,16 6.290,36 66.790,00 5,50%	3.671,20 3.532,56 2.619,16 3.532,56 6.290,36 7.065,12 66.790,00 71.290,00 5,50% 4,96%	3.671,20 3.532,56 3.820,76 2.619,16 3.532,56 2.975,23 6.290,36 7.065,12 6.795,99 66.790,00 71.290,00 76.460,00 5,50% 4,96% 5,00%

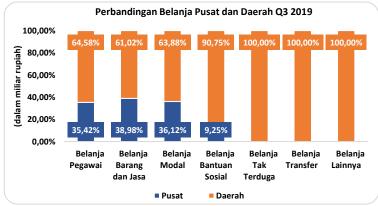
Sumber: OM SPAN, Simtrada DJPK dan BPKA, 2019 (diolah)



B. Belanja Konsolidasian

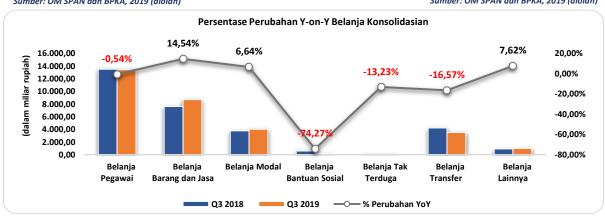
1. Analisis Perbandingan Proporsi dan Perubahan Belanja Konsolidasian





Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)

Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)



Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)

Belanja Pegawai masih merupakan kontributor terbesar dalam struktur belanja negara, dengan proporsi sebesar 43,57 persen dari total realisasi belanja (konsolidasian) sampai dengan triwulan III 2019. Ketika dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan III 2018, terjadi penurunan realisasi pada empat jenis belanja, antara lain Belanja Bantuan Sosial (-74,27 persen), Belanja Transfer (-16,57 persen) Belanja Tak Terduga (-13,23 persen), dan Belanja Pegawai (-0,54 persen). Penurunan pada Belanja Transfer sangat disayangkan mengingat jenis belanja tersebut merupakan stimulus fiskal utama dalam pembangunan yang efek *multiplier* nya sangat dibutuhkan dalam mengangkat perekonomian.

2. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam PDRB Aceh

Perkembangan Belanja di Aceh terhadap PDRB Aceh (dalam miliar rupiah)

Uraian 03 2016 O3 2017 O3 2018 Q3 2019 Realisasi Belanja Pemerintah 31.274,54 31.552,25 30.600,51 27.299,83 (non transfer) PDRB Aceh Semester I 2019 66.790,00 71.290,00 76.460,00 79.730,00 (ADHB) Rasio Belanja Pemerintah 46,83% 44,26% 40,02% 34,24% Terhadap PDRB Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)

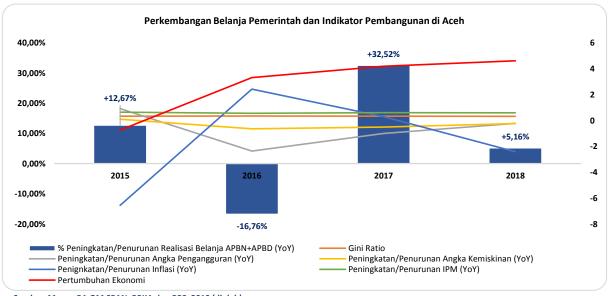
Sampai dengan Triwulan Ш 2019, rasio belania pemerintah terhadap **PDRB** 32,24 persen, Aceh sebesar menurun iika dibandingkan dengan rasio pada triwulan III

2018 yang sebesar 40,02 persen. PDRB Aceh sampai dengan Triwulan III 2019 juga



mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi belanja pemerintah sangat mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Berdasarkan data BPS Aceh, terdapat dua jenis pengeluaran yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan belanja pemerintah, yaitu Pengeluaran Rumah Tangga dan PMTB.

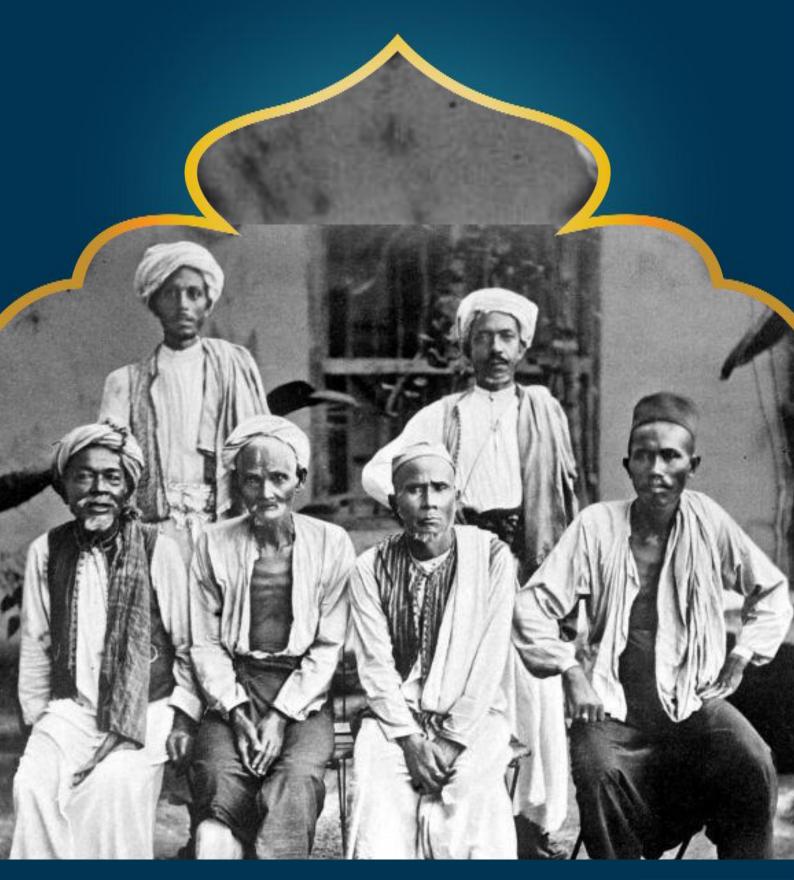
C. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional



Sumber: Monev PA,OM SPAN, BPKA dan BPS, 2019 (diolah)

Jika dilihat secata total belanja pemerintah, belum ada tren yang benar-benar sejalan antara pertumbuhan realisasi belanja pemerintah (persentase) dengan perubahan Indikator Pembangunan di Aceh. Namun angka inflasi menjadi indikator yang paling mendekati tren perubahan belanja pemerintah dari tahun ke tahun. Di posisi terakhir secara tahunan (2018), realisasi belanja pemerintah secara y-on-y meningkat sebesar 5,16 persen, dan disaat yang sama inflasi Aceh menurun setelah tahun sebelumnya sedikit meningkat. Meskipun secara signifikansi belum benar-benar sama, namun hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan konsumsi pemerintah mempengaruhi tingkat harga di Aceh.





ACEH HERITAGE:

1884, Jamaah asal Aceh di Jeddah. Foto ini diambil oleh Snouck Hungronje di Konsultan Belanda di Jeddah





A. Prospek Komoditi Jagung di Kab. Aceh Tenggara

Aceh, seperti daerah lainnya di nusantara, mempunyai banyak komoditi di sektor pertanian dan perkebunan seperti tanaman padi, jagung, kopi, coklat, karet, kelapa, kelapa sawit, buah pinang, pala, kedelai sampai dengan tanaman serai wangi dan nilam. Dari berbagai komoditi yang ada, tanaman jagung merupakan salah satu produk andalan di Provinsi Aceh. Sebaran tanaman jagung berada di hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh, dengan lahan tanam terluas berada di Kab. Aceh Tenggara. Luas lahan di daerah tersebut tersebar merata sampai berbatasan dengan Kab. Karo di Sumatera Utara. Letak geografis Kab. Aceh Tenggara yang berada di pegunungan Bukit Barisan sangat mendukung penanaman tanaman jagung.

Berdasarkan data yang dihimpun langsung dari Dinas Pertanian Kab. Aceh Tenggara, prospek komoditi jagung di wilayah tersebut sangat menjanjikan. Luas lahan tanam yang dikelola oleh kelompok tani pada tahun 2019 mencapai 19.879 hektar dan tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kab. Aceh Tenggara. Luas lahan tersebut belum termasuk lahan-lahan tanam yang berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, yang apabila diakumulasikan maka luas area tanam komoditi jagung di Kab. Aceh Tenggara bisa mencapai kurang lebih 35.000 hektar. Tercatat, terdapat 1.228 Kelompok Tani pengelola tanaman jagung, dengan jumlah petani mencapai 32.779 orang.

Produksi tanaman jagung sangat menguntungkan dan memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Dengan masa tanam sebanyak tiga kali dalam setahun, produksi tanaman jagung pada tahun 2018 mencapai 236.266 ton. Dengan asumsi harga jagung antara Rp4.000 sampai Rp4.300 per kg maka akan menghasilkan Rp945 miliar sampai dengan Rp1,01 triliun. Hasil produksi yang sangat menggairahkan tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat, khususnya petani jagung. Selain berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, hasil produksi jagung sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan diperdesaan. Oleh karena itu, jagung merupakan salah satu komoditi utama penggerak perekonomian di Kab. Aceh Tenggara. Adapun hasil produksi jagung utamanya diperuntukkan sebagai pakan ternak dan banyak dipasarkan keluar daerah wilayah.

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2019 nanti, diperkirakan produksi jagung di Kab. Aceh Tenggara akan mengalami penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan produksi jagung utamanya disebabkan karena kurangnya pasokan pupuk bersubsidi. Sedangkan pupuk non-subsidi yang tidak bersubsidi yang ada di pasaran masih sangat mahal dan tidak dapat terjangkau oleh petani jagung. Kebutuhan rata-rata pupuk adalah sebanyak 400 kg per hektar. Apabila dikalikan luas lahan tanam tahun ini, maka kebutuhan pupuk adalah sebanyak 7.951 ton. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kab. Aceh Tenggara yang yaitu sebanyak 4.500 ton pada tahun 2019.



Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Pertanian Kab. Aceh Tenggara telah melakukan berbagai upaya. Dinas terkait telah mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi Aceh, bagi para petani di Kab. Aceh Tenggara. Hasilnya, Kab. Aceh Tenggara telah mendapat tambahan pupuk bersubsidi, masing-masing pada bulan Mei 2019 sebanyak 500 ton dan bulan Agustus 2019 sebanyak 1.200 ton. Bahkan Permintaan ketiga juga telah diajukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mengantisipasi pengurangan produksi sampai dengan akhir tahun.

Berdasarkan gambaran faktual di atas, campur tangan instrumen fiskal sangat dibutuhkan. Bantuan pemerintah sebaiknya tidak hanya berupa pemberian bantuan alat mesin pertanian, bantuan benih dan bantuan pemasaran, namun juga terkait dengan pengalokasian anggaran subsidi pupuk pada APBN. Agar tidak terjadi penurunan produksi jagung di Kab. Aceh Tenggara diperlukan formula fiskal yang tepat terhadap alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan duduk bersama, harus benar-benar menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai keadaan di lapangan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk di daerah.

B. Potensi Produksi Hulu Serei Wangi di Kab. Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002). Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibu kota Blangkeieren.

Wilayah ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, disebut juga negeri Seribu Bukit dan terbagi menjadi 11 kecamatan dengan jumlah penduduk berkisar 82,394 jiwa dengan kepadatan penduduk 0,1 jiwa/km2 yang tersebar di 146 desa/kelurahan. Penduduk Gayo Lues berasal dari berbagai etnik dengan mayoritas Suku Gayo yang berbahasa Gayo. Salah satu kebanggaan masyarakat daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali (Dinkeskab Gayo Lues, 2012).

Kabupaten Gayo Lues yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang, mempunyai potensi pengembangan komoditi perkebunan rakyat yang beraneka ragam. Berdasarkan data Dinas Pertanian Gayo Lues, terdapat 12 jenis komiditi perkebunan rakyat di antaranya komoditi unggulannya adalah kopi, kakao, tembakau dan serei wangi. Bahkan khusus untuk serei wangi luas areal tanamnya mencapai 30.000 hektar, terluas di Indonesia. Dapat dikatakan serei wangi



yang dikategorikan sebagai tanaman malas merupakan jenis tanaman perkebunanpaling populer bagi masyarakat dengan sebaran areal di 10 dari 11 kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Data Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues menyebutkan produksi minyak serei wangi mencapai 2.200 ton minyak atsiri. Hal ini tidak terlepas dari program budidaya yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, mengingat dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani setempat juga sebagai upaya menjaga kelestarian hutan dari bencana longsor.

Wujud produksi tanaman serei wangi adalah berupa minyak yang disebut dengan minyak atsiri, yang dihasilkan melalui proses penyulingan dengan teknologi yang masih tradisional yaitu masih menggunakan bahan bakar kayu. Minyak atsiri ini biasa oleh para petani dijual kepada agenagen penampung untuk diolah kembali di luar Gayo Lues untuk digunakan sebagai bahan dasar untuk balsem, sabun,medis, kosmetik, dan pestisida. Bahkan diperkirakan permintaan minyak atsiri dunia akan meningkat setelah ditemukan hasil riset minyak ini sangat bagus jadi bahan baku utama bio aditif BBM.

Ketergantungan petani atas penjualan minyak atsiri kepada agen-agen penampung sangat tinggi. Harga dan waktu jual minyak atsiri ditentukan oleh agen. Hal ini salah satunya disebabkan tidak adanya industri pengolahan minyak atsiri menjadi produk konsumsi bagi masyarakat di Gayo Lues, atau pemerintah kabupaten dan petani sepertinya masih fokus pada produksi hulu serei wangi belum pada produksi hilir berbahan minyak atsiri. Amat disayangkan apabila pengolahan minyak atsiri hanya dapat dilakukan di luar Gayo Lues. Pengembangan agroindustri dan potensi pendapatan asli daerah seharusnya dapat lebih ditingkatkan apabila agroindustri pengolahan minyak atsiri dibangun di Kabupaten Gayo Lues.

Hal ini paling tidak dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran DAK Fisik yang berfokus pada pengembangan agroindustri serei wangi khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Pengembangan agroindustri serei wangi menjadi penting mengingat dengan agroindustri dapat menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan pendapatan petani tanaman atsiri, pembukaan lapang kerja di bidang agroindustri serta pengenalan sistem dan perilaku industri di pedesaan. Dengan demikian petani serei wangi tidak hanya bertumpu pada produksi hulu serei wangi namun juga dapat terlibat dalam produksi hilir minyak atsiri mengingat potensi minyak atsiri yang didukung dengan teknologi yang tepat guna dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produksi konsumsi masyarakat.



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Komplek Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lantai II-III Jl. Teungku Chik Ditiro Telepon (0651) 22462, Faksimile (0651) 22432 Banda Aceh 2341





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG A LANTAI 2-3 JALAN TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241 TELEPON (0651) 31070 FAKSIMILE 31094 SITUS www.djpbn-aceh.org

NOTA DINAS

Nomor: ND -922/WPB.01/BD.03/2019

Yth Dari

Hal

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

: Pin. Kepala

Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2019

Lampiran

1 (satu) Berkas

Tanggal

: 13 November 2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2019 untuk dapat digunakan seperlunya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

th. Halim